



Analisis Terhadap Implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung

An Analysis of the Implementation of the Merdeka Belajar Program in Bandung Regency

Ruli Isnani, Fitra Hadiansyah

**Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung
isnani.ruli@gmail.com¹, fitrahadiansyah45@gmail.com²**

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung dan Membangun argumentasi rasional intervensi dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey dan kajian literatur dengan menggunakan Interview dan survey. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Informan terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur terkait. Dari tingkat kabupaten merupakan anggota Team Penggerak Mereka Belajar Kabupaten Bandung, yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Penilik/ Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang merupakan perwakilan dari jenjang PAUD, SD, SMP dan PNFI. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi program merdeka belajar di kabupaten Bandung dilaksanakan melalui program Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar, Program Guru Penggerak, Program sekolah penggerak, IKM dan PMM, dan transformasi pendidikan khusus. Oleh karena itu Perlu dirancang kebijakan dan regulasi seperti peraturan bupati yang mendukung Merdeka Belajar, termasuk aturan yang memfasilitasi Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemanfaatan Rapor Pendidikan serta Program Pendidikan Khusus Inklusi. Dilakukan sosialisasi secara luas untuk memahami masyarakat, guru, dan pihak terkait tentang konsep dan manfaat Merdeka Belajar, perubahan kebijakan dan langkah-langkah implementasi kepada semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Implementasi Program, Merdeka Belajar, Pendidikan, Regulasi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Merdeka Belajar program in Bandung Regency and build rational arguments for government to support intervention in implementing the Merdeka Belajar program in Bandung Regency. The approach used is qualitative using surveys and literature studies using interviews and surveys. Informants in this research were selected using purposive sampling. The informants consisted of representatives from various related elements. From the district level, they are members of the Bandung Regency Learning Mobilization Team, which consists of elements from the Education Office, Inspectors/Supervisors, School Principals and Teachers who are representatives from PAUD, SD, SMP and PNFI levels. The findings of the study show that the implementation of the Merdeka Belajar program in Bandung regency was carried out through the National Assessment and Learning Environment Survey, the Mobilizing Teacher, the Mobilizing School, IKM and PMM, and special education transformation program. Therefore, it is necessary to design policies and regulations such as regent's regulations that support Independent Learning, including regulations that facilitate National Assessments,



Mobilizing Teacher Programs, Mobilizing School Programs, Implementing the Independent Curriculum, Utilizing Educational Report Cards and Inclusive Special Education Programs. Widespread outreach was carried out to understand the community, teachers and related parties about the concept and benefits of Merdeka Belajar, policy changes and implementation steps for all stakeholders.

Keywords: Implementation of Program, Freedom to Learn, Education, Regulation

A. PENDAHULUAN

Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, sejak 2009 Pemerintah telah memenuhi kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% APBN serta terus meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 332,4 T pada 2013, menjadi Rp 550 T pada 2021 (kemenkeu. go.id, 2021). Peningkatan anggaran tersebut telah berkontribusi positif pada perbaikan tingkat pendidikan dan kesejahteraan guru, penurunan ukuran kelas (rasio guru-siswa), serta perbaikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan (Beatty et.al, 2021; Muttaqin, 2018).

Namun demikian, berbagai indikator hasil belajar siswa belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Sebagaimana akan diulas lebih detail pada artikel ini, berbagai pengukuran hasil belajar siswa menunjukkan masih relatif rendahnya kualitas hasil belajar di Indonesia. Pun demikian, tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada konteks inilah pendidikan di Indonesia tengah mengalami krisis pembelajaran, yang apabila tidak segera ditangani akan menguatkan apa yang disampaikan Pritchett (2012) sebagai *schooling ain't learning*: bersekolah namun tidak belajar. Krisis pembelajaran yang telah terjadi sekian lama tersebut, diperburuk dengan Pandemi Covid-19 yang seketika membawa perubahan pada wajah pendidikan di Indonesia.

Perubahan yang paling nyata tampak pada proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Intensitas belajar mengajar juga mengalami penurunan yang signifikan, baik jumlah hari belajar dalam seminggu maupun rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari. Selama PJJ, umumnya siswa belajar 2-4 hari dalam seminggu terutama siswa pada tingkat SMP, SMA, dan SMK (Puslitjak, 2020). Di DKI Jakarta, rata-rata waktu yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh hanya 3.5 jam/ hari, sementara di luar Jawa lebih pendek lagi yaitu hanya 2,2 jam/ hari (UNICEF, 2020). Keterbatasan akses internet, perangkat digital serta kapasitas baik guru, orang tua, maupun siswa dipandang menjadi tantangan terbesar dalam menyelenggarakan PJJ (Afriansyah, 2020; UNICEF, 2020).

Di tengah keterbatasan yang ada, berbagai strategi dilakukan sekolah untuk menyelenggarakan PJJ. Pratiwi dan Utama (2020) mengidentifikasi setidaknya enam strategi yang dilakukan sekolah. Pertama, di wilayah dengan akses internet dan perangkat digital memadai, serta didukung oleh guru dan siswa yang melek digital pembelajaran dapat berjalan relatif baik dengan kelas di ruang maya (*interactive virtual classroom*) dan mengoptimalkan aplikasi belajar daring. Kedua, di sekolah-sekolah dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai namun tidak didukung dengan keterampilan digital guru/siswa, PJJ dilakukan secara terbatas. Dalam hal ini penugasan dan pembimbingan oleh guru umumnya dilakukan melalui aplikasi media sosial WhatsApp. Ketiga, beberapa sekolah dengan akses internet terbatas melaksanakan proses belajar dalam kelompok-kelompok kecil rumah guru atau siswa. Keempat, beberapa sekolah yang juga tanpa jaringan internet memanfaatkan radio lokal/ radio amatir untuk menyebarkan penugasan. Kelima, terdapat sekolah yang menggunakan pesan berantai (*"mouth to mouth"* message) untuk menyampaikan tugas ke siswa. Terakhir, beberapa sekolah bahkan terpaksa harus meliburkan siswanya.



Studi-studi lebih lanjut memberi perhatian pada dampak-dampak yang terjadi dalam perubahan radikal dalam proses pembelajaran selama pandemi. Temuan studi-studi tersebut antara lain menunjukkan terjadinya ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yaitu ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas maupun mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang. Studi Indrawati, Prihadi dan Siantoro (2020) di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pada awal PJJ, hanya 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah. Kondisi ini diperburuk dengan siswa yang melaksanakan PJJ pun tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama sebagaimana sebelum pandemi. Banyak siswa hanya menerima instruksi, umpan balik, dan interaksi yang terbatas dari guru mereka (Indrawati, Pihadi, dan Siantoro, 2020). Kondisi ini berkontribusi pada menurunnya kemampuan siswa, ketidaktercapaian pembelajaran, ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar, perkembangan emosi dan kesehatan psikologis yang terganggu, kerentanan putus sekolah, serta potensi penurunan pendapatan siswa di kemudian hari (The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia, 2020). Temuan serupa juga dihasilkan dari kajian Puslitjak dan INOVASI yang menunjukkan bahwa pada kelas awal, hilangnya kemampuan belajar siswa dalam hal literasi dan numerasi sebelum dan selama pandemi setara dengan 5-6 bulan setelah 12 bulan belajar dari rumah (Puslitjak dan INOVASI, 2020). Studi yang sama juga menunjukkan bahwa ketika siswa tidak menguasai hal-hal yang seharusnya dipelajari pada satu tahun akan memiliki efek majemuk pada apa yang bisa dipelajari siswa pada jenjang berikutnya (Puslitjak dan INOVASI, 2020).

Dampak lain adalah menguatnya kesenjangan pembelajaran (learning gap) selama pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia, kesenjangan pendidikan terjadi jauh sebelum pandemi dan semakin menguat ketika pandemi. Indikasi penguatan kesenjangan tampak dari pola keberagaman proses pembelajaran selama pandemi. Survei Kemendikbud (2020) memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penggunaan platform pembelajaran antara sekolah di daerah 3T dan kawasan non-3T. Hasil serupa juga ditunjukkan dari studi The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia (2020) yang memperlihatkan adanya kesenjangan penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan terutama di luar Pulau Jawa.

Pola keberagaman dalam proses pembelajaran ini selanjutnya memberi pengaruh pada semakin melebarnya kesenjangan hasil pembelajaran siswa selama pandemi. Terkait hal ini, temuan The SMERU Research Institute (2020) menunjukkan dua hal. Pertama, analisis ketimpangan belajar di dalam kelas menunjukkan bahwa siswa yang memiliki akses terhadap perangkat digital, memiliki guru adaptif, pada kondisi sosial ekonomi lebih tinggi, serta mempunyai orang tua yang aktif berkomunikasi dengan guru cenderung memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kedua, ketimpangan hasil belajar antar siswa dalam satu kelas pun diprediksi akan semakin lebar. Apabila tidak ada intervensi yang mendorong guru untuk menyusun pembelajaran yang memperhatikan keragaman kemampuan belajar siswa, maka siswa dengan kemampuan rendah akan semakin tertinggal dari siswa lainnya. Studi INOVASI dan Puslitjak (2020) menunjukkan risiko yang lebih besar dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran ini. Menurut studi tersebut, "pembelajaran selama COVID-19 memiliki dampak yang lebih besar pada beberapa kelompok siswa, di mana siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi lebih rendah lebih berisiko tidak terdaftar lagi atau tidak lagi berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Antisipasi dampak pandemi terhadap ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan kesenjangan pembelajaran (learning gap) sebenarnya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada Agustus 2020, Disdik Kabupaten Bandung menerbitkan buku pedoman khusus untuk pembelajaran anak di masa pandemi virus Corona. Buku berjudul "Sabilulungan Based Learning (Sabale)" merupakan pedoman agar anak dan guru tetap bisa



belajar dan mengajar di tengah pandemi. Buku panduan ini berasal dari beberapa kumpulan pengalaman dirinya bersama kepala sekolah di Kabupaten Bandung dalam usaha menerapkan pembelajaran di tengah pandemi virus Corona. Buku yang berisikan tentang bagaimana penerapan pembelajaran baik secara daring, luring dan kombinasi dari kedua metode antara daring dan luring. Selain itu, disertai juga petunjuk teknis terkait pencegahan dan juga penanggulangan ketika ada siswa yang diduga mengalami gejala Covid 19.

Buku ini merujuk pada ketentuan dan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) ini pada intinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Guru juga didorong untuk melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif (kemampuan dan capaian pembelajaran siswa) dan kondisi non-kognitif (aspek psikologis dan kondisi emosional siswa) sebagai dampak dari PJJ. Dengan asesmen diagnostik ini diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan siswa mereka.

Setelah berjalan hampir satu tahun ajaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran selama pandemi dengan menggunakan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa siswa penggunaan kurikulum darurat secara signifikan juga mampu mengurangi indikasi learning-loss selama pandemi baik untuk capaian literasi maupun numerasi Hasil positif di atas menunjukkan bahwa intervensi kurikulum darurat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah kembali ke situasi normal, pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, melakukan pengembangan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19, melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mengoptimalkan hasil belajar siswa.

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung perlu dilakukan secara sinergi dan kolaborasi, antara kemendikbudristek yang mengusung program, dengan pemerintah daerah (Pemda). Dukungan ini harapannya dapat menguatkan kolaborasi dan meredam terjadinya miskonsepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Dari latar belakang ini, maka perlu dilaksanakan studi tentang implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Bandung. Adapun tujuan studi ini adalah untuk Menganalisis pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung dan Membangun argumentasi rasional intervensi dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung. Diharapkan hasil studi yang dilakukan akan memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang implementasi merdeka belajar di Kabupaten Bandung.

B. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Merdeka Belajar

Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program merdeka belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan. Konsep Merdeka Belajar ini kemudian dibreakdown menjadi kurikulum merdeka belajar yakni kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dengan kurikulum ini maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya.



Melalui kurikulum ini, maka guru bisa memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat dari masing-masing peserta didik. Kurikulum baru 2021 ini nantinya akan digunakan untuk seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK maupun Pendidikan Khusus dan Kesetaraan.

Terdapat perbedaan dari Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menjadi opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Selain itu, Kemendikbud Ristek juga akan melakukan pengkajian ulang di tahun 2024 mendatang.

Project untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Project tersebut tidak ditujukan untuk mencapai target pembelajaran tertentu. Dengan demikian tidak akan terikat pada konten mata pelajaran tertentu juga.

Isi Pokok Merdeka Belajar

Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program merdeka belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memulai Transformasi pendidikan Indonesia dengan meluncurkan beberapa paket episode Merdeka Belajar yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. paket episode Merdeka Belajar

MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
Episode 1	Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB	Pembelajaran mandiri yang menghadirkan terobosan dalam 4 pokok kebijakan sehingga paradigma dan cara belajar lama dan pengajaran dapat ditransformasikan menuju kemajuan yaitu: Mengganti Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional Menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi
episode 2	Kampus Merdeka	Memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi Kemudahan untuk menjadi PTN BH Hak belajar tiga semester di luar program studi
episode 3	Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS	Transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah. Keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan Dana BOS. Peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS. Perbaikan sistem pelaporan dana BOS untuk transparansi dan akuntabilitas.



MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
episode 4	Program Organisasi Penggerak	Memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong-royong meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid.
episode 5	Guru Penggerak	Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.
episode 6	Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi	Insentif berdasarkan capaian IKU (untuk PTN) Matching fund untuk kerja sama dengan mitra (Untuk PTN dan PTS) Competitive fund program kompetisi Kampus Merdeka (Untuk PTN dan PTS)
episode 7	Program Sekolah Penggerak	Mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.
episode 8	SMK Pusat Keunggulan	Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya, melalui: Keterlibatan industri dalam proses pembelajaran Pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri Pelatihan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah Fasilitas pembelajaran berbasis industri Terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujud link and match yang semakin optimal
episode 9	KIP Merdeka Kuliah	Memberikan kemerdekaan bagi murid dan keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik Menaikkan alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi Meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial
episode 10	Perluasan Program	Beasiswa Kampus Merdeka



MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
	Beasiswa LPDP	Beasiswa bagi Dosen, Guru dan Tenaga Kependidikan Beasiswa Program Vokasi dan Program Prestasi Beasiswa Kebudayaan
episode 11	Kampus Merdeka Vokasi	Dana Kompetitif kampus vokasi (Competitive Fund Vokasi) dengan program SMK-D2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D3 menjadi sarana terapan (D4) Dana padanan kampus vokasi (Matching Fund Vokasi) dengan program penguatan pusat unggulan teknologi (PUT), hilirisasi produk purwarupa/teknologi, dan start-up produk inovasi perguruan tinggi
episode 12	Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah	Tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam.
episode 13	Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana	Untuk pertama kalinya di Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan platform media ekspresi, pustaka, serta promosi budaya yang terintegrasi dan dapat diakses melalui: Laman Indonesiana TV Siaran televisi jaringan Indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD) Media sosial Indonesiana
episode 14	Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual	Pemenuhan hal pendidikan setiap WNI Penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual Penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi
episode 15	Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar	Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik Memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
episode 16	Akselerasi dan	Penyaluran langsung ke rekening satuan



MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
	Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	pendidikan Fleksibilitas penggunaan bantuan Nilai satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah Digitalisasi perencanaan dan pelaporan dana BOS melalui aplikasi tunggal ARKAS
episode 17	Revitalisasi Bahasa Daerah	Menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah dan sastra daerah Menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya Menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah
episode 18	Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana	Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang digunakan untuk mendukung: Revitalisasi kegiatan ekspresi budaya Pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil dan berkelanjutan
episode 19	Rapor Pendidikan indonesia	Platform yang berisi hasil asesmen nasional dan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan. Data pendidikan yang terintegrasi/ untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif dan berbasis data.
episode 20	Praktisi Mengajar	Praktisi mengajar bersama dosen, membantu perencanaan bahan ajar dan melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Honor praktisi didanai oleh Kemendikbudristek, dana langsung dikirim kepada praktisi. Alokasi anggaran Rp 140 miliar untuk lebih dari 2.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek.
episode 21	Dana Abadi Perguruan Tinggi	Dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 7 triliun rupiah yang bunganya akan disalurkan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Dana abadi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Setiap PTNBH diharapkan memiliki dana abadi masing-masing dan menggalang dana tambahan



MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
		<p>dari tahun ke tahun dan harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal.</p> <p>Dana abadi perguruan tinggi dapat digunakan secara fleksibel oleh PTNBH</p>
episode 22	Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri	<p>Bertujuan untuk mendorong dan mengasah akal dan karakter swadaya yang lebih holistik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia</p>
episode 23	Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia	<p>Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru. untuk menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia akibat rendahnya kebiasaan membaca sejak dini. “Penyebab rendahnya kebiasaan membaca adalah masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik</p>
episode 24	Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	<p>Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak bisa mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke SD. Peserta didik PAUD dapat terus melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat jenjang SD</p> <p>Untuk itu ada 6 Point penting dari kebijakan ini yaitu antara lain:</p> <p>Menghilangkan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung) dari proses penerimaan peserta didik baru di jenjang sekolah dasar (SD).</p> <p>Tidak ada evaluasi kelulusan untuk peserta didik PAUD.</p> <p>Kompetensi lulusan untuk PAUD tidak dirancang per usia, melainkan sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase.</p> <p>Menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama, termasuk untuk orang tua/wali murid. Berlaku di PAUD maupun SD.</p> <p>Tidak ada tuntutan anak kelas I untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung</p> <p>Menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD</p>
episode 25	Pencegahan dan Penanganan	<p>menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan</p>

MERDEKA BELAJAR	ISI POKOK MB	DESKRIPSI
	Kekerasan di Lingkungan Pendidikan	intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban
Episode 26	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus dalam meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian Masyarakat

Diantara 24 episode merdeka belajar tersebut, terdapat beberapa program proiritas, yaitu:

1. Asesmen Nasional
 - a. Asesmen Nasional suatu program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan di jenjang sekolah dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasar pada hasil belajar murid secara mendasar yang meliputi literasi, numerasi dan karakter. Termasuk kualitas dari proses belajar-mengajar hingga iklim satuan pendidikan sebagai pendukung belajar-mengajar.
 - b. AN diperlukan guna meningkatkan mutu pendidikan daan dirancang menghasilkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar-mengajar, pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar si murid.
 - c. Tujuan AN adalah untuk memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, serta untuk memberi gambaran tentang karakteristik esensial dalam sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tadi.
2. Guru Penggerak
 - a. Program pendidikan kepemimpinan bagi guru agar mampu menggerakkan seluruh ekosistem sekolah, sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.
 - b. Guru penggerak merupakan guru yang tergerak dengan potensi yang dimilikinya untuk bergerak mengembangkan potensinya dengan mendalami nilai dan peran guru penggerak sehingga mampu menggerakkan ekosistem sekolahnya sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadi bagian transformasi pendidikan.
 - c. Pemerintah Daerah berperan memberikan apresiasi kepada guru penggerak melalui kebijakan pengangkatan Guru penggerak menjadi Kepala Sekolah.
3. Program Sekolah Penggerak
 - a. Program Sekolah Penggerak merupakan program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil Pelajar Pancasila, yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.



- b. Program Sekolah Penggerak akan dilaksanakan secara bertahap melalui sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
 - c. Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil Pelajar Pancasila.
4. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar
- a. Implementasi Kurikulum merdeka merupakan strategi pelaksanaan kurikulum dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik
 - b. Kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
 - c. Satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari 3 (tiga) kategori pelaksanaan implementasi:
 - 1) Mandiri belajar akan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa bagian atau prinsip-prinsipnya saja tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan Pendidikan
 - 2) Mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan.
 - 3) Mandiri berbagi memberikan kebebasan kepada sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Jalur ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajar pada satuan pendidikan.
5. Rapor Pendidikan Indonesia
- a. Rapor Pendidikan Indonesia adalah Platform yang berisi hasil asesmen nasional dan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan.
 - b. Rapor Pendidikan Indonesia bertujuan agar satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi. Sehingga, bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data
 - c. Rapor Pendidikan memiliki beberapa keuntungan yang dapat dijadikan sebagai:
 - 1) Data pendidikan yang terintegrasi/ untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif dan berbasis data.
 - 2) Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan
 - 3) Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional
 - 4) Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi program merdeka belajar di Kabupaten Bandung. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik baik seputar implementasi program merdeka belajar.

Metode studi literatur dan survei digunakan dalam penulisan artikel ini. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji teori-teori merdeka belajar dengan melihat hasil-hasil pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung, dan juga analisa terhadap peraturan/ perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan pelaksanaan program merdeka belajar. Selanjutnya, Metode survei dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung.

Studi ini dilakukan di beberapa satuan pendidikan, yang dipilih melalui pendekatan purposive sampling untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP disesuaikan dengan tujuan dari kajian ini.

Informan yang terlibat dalam artikel ini merupakan praktisi dan stakeholder dalam implementasi program merdeka belajar di Kabupaten Bandung yang dipilih dengan metode purposive sampling. Informan terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur terkait. Dari tingkat kabupaten merupakan anggota Team Penggerak Mereka Belajar Kabupaten Bandung, yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Penilik/ Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang merupakan perwakilan dari jenjang PAUD, SD, SMP dan PNFI.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Wawancara semi terstruktur, dan mengacu kepada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Pengisian kuisioner, yang berisikan pernyataan-pernyataan yang terkait implementasi Merdeka Belajar di kabupaten Bandung.
3. Observasi pun dilakukan terhadap hasil adoption rate rapor pendidikan kabupaten Bandung, jenjang PAUD, SD dan SMP.
4. FGD dilakukan sebagai bagian dari proses triangulasi atau pengecekan data. Pertanyaan yang diajukan ketika FGD sama dengan pertanyaan yang diajukan ketika wawancara. Hanya saja ketika FGD dilakukan, partisipan dibagi kepada enam kelompok sesuai dengan program prioritas Merdeka Belajar, yaitu TP AN/ Sulingjar, TP PSP, TP PGP, TP IKM, TP RP dan PBD, serta TAPI Pendidikan Inklusi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung

Merdeka Belajar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa, yang di-breakdown menjadi kurikulum merdeka belajar yakni kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Dengan kurikulum ini maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya.

Dalam paradigma merdeka belajar ada beberapa program yang sudah diimplementasikan di kabupaten Bandung sebagai perwujudan pelaksanaan merdeka belajar yaitu:

Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar di Kabupaten Bandung



Hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, terkait dengan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar, diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 1. Asesmen Nasional

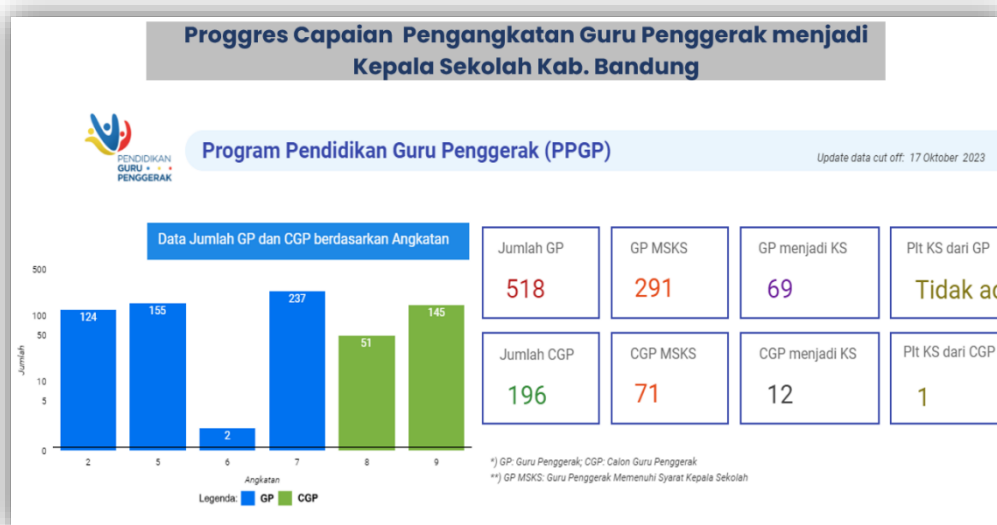
Dari data tersebut diketahui bahwa persepsi positif stakeholder Daerah dan Satuan pendidikan terhadap pentingnya kebijakan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan belajar di Kabupaten Bandung adalah 30%. Namun demikian apabila dilihat dari prosentase tiap jenjang, persepsi positif terhadap AN dan Sulingjar di bidang Kesetaraan masih rendah. Demikian juga persepsi positif sulingjar di PAUD baru mencapai 30%. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan tantangan dalam membangun pemahaman menyeluruh di seluruh stakeholder. Pada Jenjang Kesetaraan, Persepsi positif terhadap AN dan Sulingjar di bidang Kesetaraan masih rendah. Dengan demikian Keterbatasan pemahaman di bidang Kesetaraan menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan informasi terkait manfaat AN dan Sulingjar dalam mendukung kesetaraan pendidikan di semua jenjang.

Persepsi Positif Sulingjar di PAUD baru mencapai 30%. Dengan demikian, Tingkat persepsi yang rendah di tingkat PAUD menunjukkan kebutuhan akan strategi khusus untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terkait Sulingjar di lembaga pendidikan ini.

Guru Penggerak di Kabupaten Bandung

Program ini merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, diperoleh data bahwa Guru Penggerak di Kabupaten Bandung berjumlah 518 orang, mereka berasal dari angkatan 2 sebanyak 124 orang, angkatan 5 sebanyak 156 orang, angkatan 6 sebanyak 2 orang, angkatan 7 sebanyak 237 orang. Dari 518 orang guru penggerak tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah memberdayakan 69 orang diangkat menjadi Kepala Sekolah, sebanyak 291 lainnya adalah guru penggerak yang sudah memenuhi syarat menjadi Kepala Sekolah.

Di samping itu, terdapat Calon Guru Penggerak yang masih mengikuti pelatihan adalah sebanyak 196 orang, dan di antaranya telah memberdayakan 12 orang Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah, dan ada yang menjadi PLT Kepala Sekolah Sebanyak 1 orang, serta 71 lainnya sudah memenuhi syarat menjadi Kepala Sekolah, sebagaimana dalam diagram berikut:



Gambar 2. Progres Capaian Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah Kabupaten Bandung

Dari data tersebut tentunya masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberdayakan mereka dengan diangkat menjadi Kepala Sekolah atau lainnya. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah menerangkan bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Lalu, untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Sebagai apresiasi terhadap guru penggerak, diharapkan pemerintah kabupaten Bandung mendukung kebijakan pusat dengan memberikan kesempatan promosi jabatan bagi Guru Penggerak menjadi kepala sekolah. Harapannya, dengan memberdayakan Guru Penggerak, sekolah akan menjadi lebih baik dan dapat menginspirasi sekolah lain. Namun demikian, tentu hal ini berkaitan juga dengan penganggaran biaya yang harus disediakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Bandung

Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kabupaten Bandung berkesempatan mengimplementasikan Program Sekolah penggerak pada angkatan ke 3, yakni tahun 2023. Sekolah yang lolos pada seleksi PSP di Kabupaten Bandung sebanyak 44 satuan pendidikan, yakni 17 satuan PAUD, 18 Sekolah Dasar, dan 9 Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana dalam diagram berikut:



DATA SEKOLAH PELAKSANA PSP KABUPATEN BANDUNG

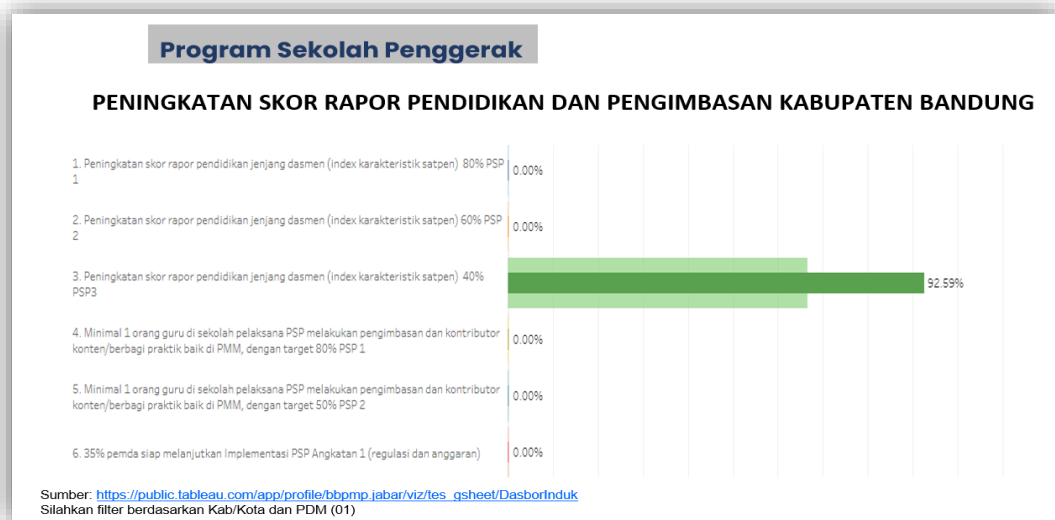
ANGKATAN	PAUD	SD	SMP	TOTAL
PSP 1	-	-	-	-
PSP 2	-	-	-	-
PSP 3	17	18	9	44
GRAND TOTAL				44

Sumber: <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/implementasi-psp>

Gambar 3. Data Sekolah Pelaksanaan PSP Kabupaten Bandung

Dari 44 Sekolah pelaksana Program Sekolah penggerak tersebut diharapkan pendidikan akan berfokus pada kompetensi kognitif peserta didik secara holistik yaitu literasi, numerasi dan karakter, yang diawali dengan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dengan demikian melalui Sekolah Penggerak, diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan SDM manusia, serta percepatan peningkatan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, terkait dengan Peningkatan skor Rapor Pendidikan dan Pengimbasan di Kabupaten Bandung, diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 4. Program Sekolah Penggerak

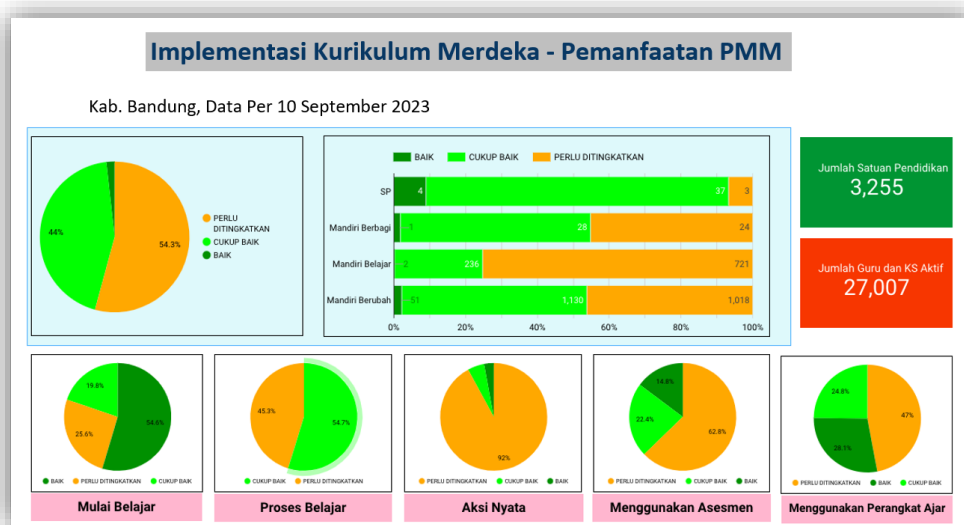
Dari diagram tersebut diperoleh data bahwa peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasar dan menengah di kabupaten Bandung untuk indeks karakteristik satuan Pendidikan masih ada pada kisaran 40%. Hal ini dikarenakan memang Kabupaten Bandung baru melaksanakan PSP ini pada angkatan 3, yakni tahun 2023, jadi belum banyak hasil yang diharapkan. Bahkan dari 44 sekolah pelaksana PSP tersebut belum ada satu orang pun guru

dari sekolah pelaksana PSP yang melakukan pengimbasan dan kontribusi konten/ berbagi praktik baik.

IKM dan PMM di Kabupaten Bandung

Dalam rangka pemulihan dalam ketertinggalan kegiatan pembelajaran (learning loss) di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan kebijakan baru berupa pengembangan dari kurikulum merdeka. Pemerintah mulai gencar untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia sekaligus memulihkan kualitas pembelajaran melalui pengeluaran kebijakan baru mengenai kurikulum merdeka yang dimulai pada tahun 2022-2024. Namun pada penerapan kebijakan baru mengenai kurikulum merdeka ini, pemerintah memberikan kebebasan pada setiap satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu; Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Kemudian seluruh PTK diwajibkan untuk log in dan aktivasi akun belajar ide dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan Kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Pemanfaatan PMM, diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 5. Implementasi Kurikulum Merdeka – Pemanfaatan PMM

Dari diagram tersebut diperoleh data bahwa:

1. Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung yang melaksanakan Kurikulum Merdeka sebanyak 3255 satuan Pendidikan
2. Jumlah guru dan Kepala Sekolah yang aktif adalah 27.007 orang
3. Secara umum, Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung, masih perlu ditingkatkan sekitar 54.3%, cukup baik mencapai 44%, dan yang sudah baik 1.7%
4. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Pelaksana PSP, hampir semuanya menunjukkan warna hijau, artinya cukup baik, dan bahkan ada 4 sekolah yang sudah masuk katagori baik, namun masih ada 3 sekolah lagi yang perlu ditingkatkan
5. Implementasi Kurikulum Merdeka dengan katagori mandiri berbagi, terdapat 28 sekolah sudah menunjukkan warna hijau artinya cukup baik, dan bahkan ada 1



- sekolah yang sudah masuk katagori baik, namun masih ada 24 sekolah lagi yang perlu ditingkatkan
6. Implementasi Kurikulum Merdeka dengan katagori mandiri belajar, terdapat 236 sekolah sudah menunjukkan warna hijau artinya cukup baik, dan bahkan ada 2 sekolah yang sudah masuk katagori baik, namun masih ada 721sekolah lagi yang perlu ditingkatkan
 7. Implementasi Kurikulum Merdeka dengan katagori mandiri berubah, terdapat 1130 sekolah sudah menunjukkan warna hijau artinya cukup baik, dan bahkan ada 51 sekolah yang sudah masuk katagori baik, namun masih ada 1018 sekolah lagi yang perlu ditingkatkan
 8. Dalam pemanfaatan PMM, Pendidik dan Tenaga kependidikan di kabupaten Bandung harus menempuh beberapa tahapan, yaitu mulai belajar, proses belajar, membuat aksi nyata, menggunakan asesmen dan menggunakan perangkat ajar.
 9. Pemanfaatan PMM oleh PTK Kabupaten Bandung untuk tahap Mulai belajar, 54.6% sudah baik dan 19.8% sudah cukup baik, namun masih ada 25.6% masih perlu ditingkatkan
 10. Pemanfaatan PMM oleh PTK Kabupaten Bandung untuk tahap Proses Belajar, 54.7% sudah cukup baik, namun masih ada 45.3% masih perlu ditingkatkan, dan bahkan belum ada Satu pun yang katagori baik.
 11. Pemanfaatan PMM oleh PTK Kabupaten Bandung untuk tahap Aksi Nyata, 3% sudah baik dan 6% sudah cukup baik, namun masih ada 92% masih perlu ditingkatkan
 12. Pemanfaatan PMM oleh PTK Kabupaten Bandung untuk tahap Menggunakan Asesmen, 14.8% sudah baik dan 22.4% sudah cukup baik, namun masih ada 62.8% masih perlu ditingkatkan
 13. Pemanfaatan PMM oleh PTK Kabupaten Bandung untuk tahap Menggunakan Perangkat ajar, 28.1% sudah baik dan 24.8% sudah cukup baik, namun masih ada 47% masih perlu ditingkatkan

Di samping data tersebut, dalam pelaksanaan IKM, Kabupaten Bandung juga mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan beberapa mitra pembangunan yang sudah terdaftar di kementerian pendidikan, yaitu:

1. Kelas Pintar untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
2. PT Astra Daihatsu Motor untuk jenjang SMK
3. Yayasan Guru Belajar untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
4. EduCourse, untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB
5. Mitra Pembangunan tersebut berfungsi:
6. mendukung dinas pendidikan dalam membentuk pokja/ tim pendamping implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek
7. membantu advokasi agar implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek masuk dalam program kerja dan kebijakan di daerah
8. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam proses pelaksanaan program kemitraan PDM
9. bersama dinas pendidikan memantau aktivitas pelaksanaan program kemitraan PDM Kemendikbudristek
10. Untuk satuan pendidikan, Mitra Pembangunan dapat membantu proses penerapan implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek di satuan pendidikan

Implementasi Kurikulum Merdeka – Mitra Pembangunan

Contoh Kab. Bandung, Data Per 10 September 2023

Kabupaten/Kota	Mitra Pembangunan	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1. Kab. Bandung	Kelas Pintar	-	✓	✓	✓	✓	-
2. Kab. Bandung	PT. Astra Daihatsu Motor	-	-	-	-	✓	-
3. Kab. Bandung	Yayasan Guru Belajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Kab. Bandung	Educourse	-	✓	✓	✓	-	✓

Sumber: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/data/knjabar2023>

Gambar 6. Implementasi Kurikulum Merdeka – Mitra Pembangunan

Peluang tersebut sebaiknya segera dimanfaatkan oleh satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu Pemerintah hendaknya:

1. Mendorong Satuan Pendidikan sebagai pelaksana implementasi kebijakan dan program PDM Kemendikbudristek berperan dalam:
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas/ penilik, serta mendukung pelaksanaan program kemitraan PDM di satuan pendidikan
 - b. menginformasikan pelaksanaan program kemitraan PDM kepada dinas pendidikan
 - c. menyediakan fasilitas dan SDM yang mendukung pelaksanaan program kemitraan PDM
2. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung agar:
 - a. menetapkan bersama arah dan kebijakan kemitraan di kabupaten
 - b. mengidentifikasi kebutuhan kemitraan di kabupaten
 - c. menyusun program kemitraan di kabupaten
 - d. memfasilitasi Mitra Pembangunan PDM dalam melaksanakan kemitraan di kabupaten
 - e. melakukan dialog dengan Mitra Pembangunan PDM
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan PDM di kabupaten

Kondisi Rapor Pendidikan Kabupaten Bandung

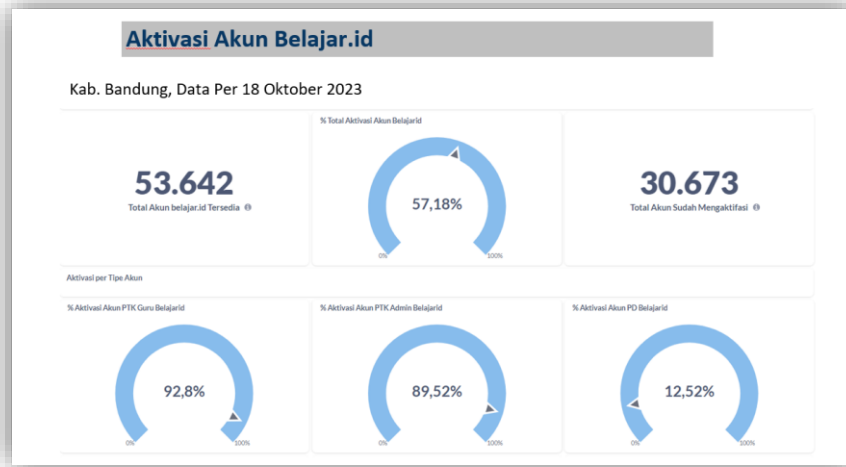
Rapor Pendidikan bertujuan agar satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi. Sehingga, bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data.

Penggunaannya bersifat tidak wajib, namun pemerintah daerah dan satuan pendidikan sangat disarankan untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai bahan acuan dasar dalam pelaksanaan perencanaan berbasis data. Data yang ada dalam Rapor Pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat merepresentasikan kondisi satuan pendidikan pada saat ini, sehingga pada dasarnya tidak diperlukan lagi untuk melakukan pengumpulan data atau penggunaan data di luar Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan.

Untuk bisa masuk ke website Rapor Pendidikan, maka terlebih dahulu harus memiliki akun belajar.id agar bisa mengunjungi laman ini raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Sebab website Rapor pendidikan hanya bisa diakses oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan daerah serta akun admin belajar.id. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Dashboard



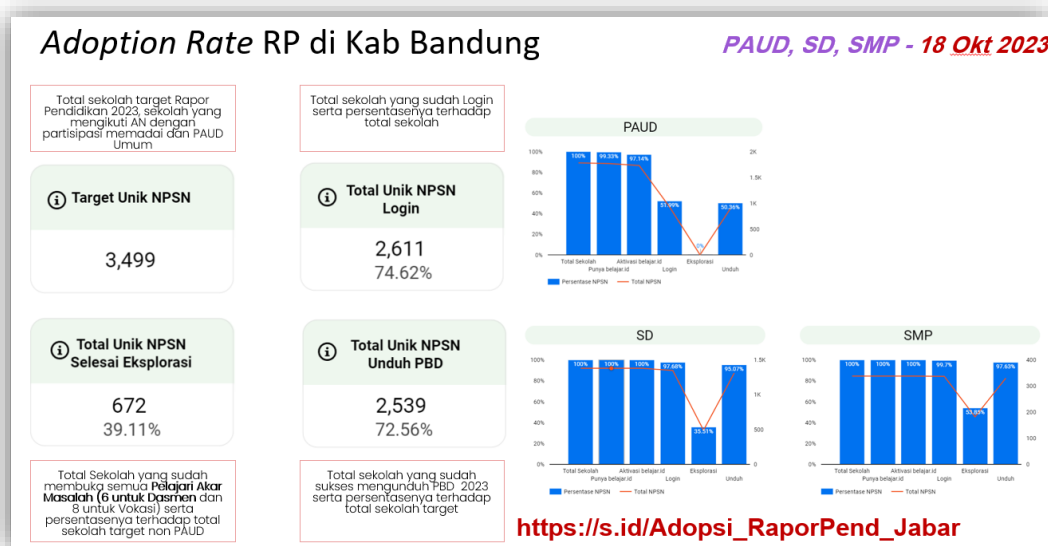
Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, berikut data pemilik akun belajar.id di kabupaten Bandung:



Gambar 7. Aktivasi Akun Belajar.id

Diagram tersebut menunjukkan data bahwa dari jumlah 287.001 GTK kabupaten Bandung, baru sekitar 53.642 orang yang memiliki akun belajar.id dan dari jumlah tersebut, total akun yang sudah mengaktifkan adalah 30.673 akun, atau sekitar 57.18%. Selanjutnya, Dari keseluruhan data tersebut 92.8% sudah aktivasi akun PTK Guru.belajar.id, 89% sudah aktivasi akun PTK admin.belajar.id, dan 12.52% sudah aktivasi akun PTK PD.belajar.id dan Masih perlu terus didorong kesadaran PTK Kab Bandung agar bisa aktivasi akun belajar.id.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, berikut pertumbuhan adopsi RP Kabupaten Bandung:

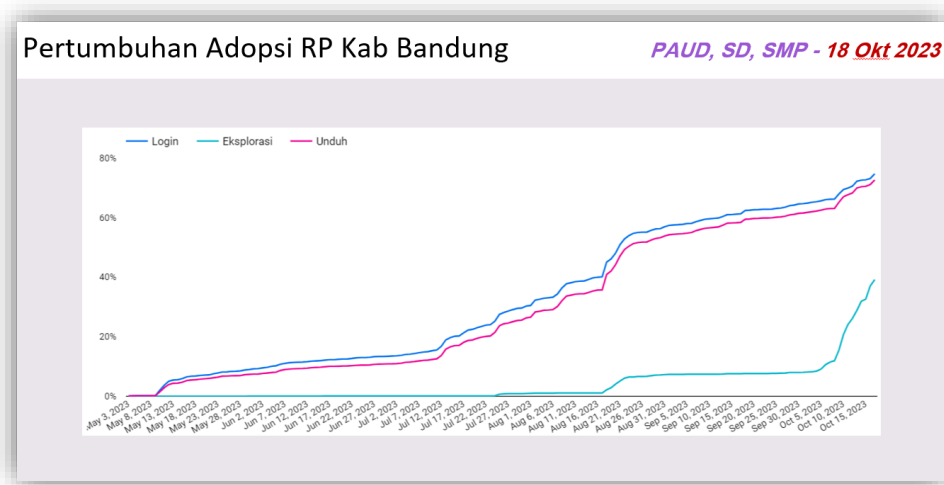


Gambar 8. Adoption Rate RP di Kabupaten Bandung

Dari diagram tersebut diperoleh data bahwa:

1. Total sekolah target Rapor Pendidikan 2023, sekolah yang mengikuti AN dengan partisipasi memadai dan PAUD umum, sebanyak 3499 Satuan Pendidikan
2. Total sekolah yang sudah login adalah 2611 sekolah, setara dengan 74.62%
3. Sekolah yang sudah membuka semua “Pelajari Akar Masalah” adalah sebanyak 672 sekolah, atau setara dengan 39.11%
4. Sekolah yang sudah sukses mengunduh PBD tahun 2023 adalah 2539 sekolah, atau sekira 72.56%.

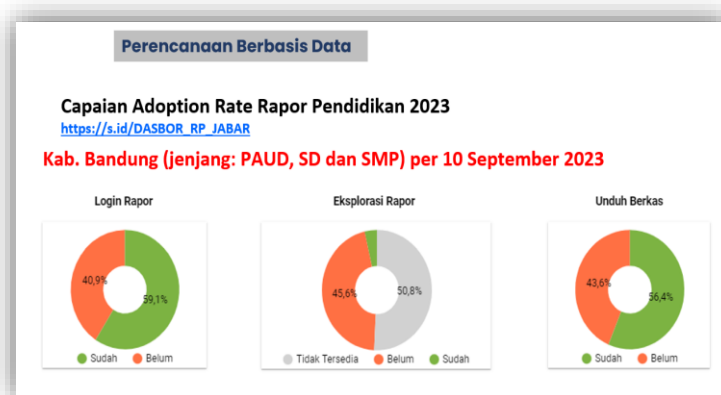
Berikut pertumbuhan adopsi rapor pendidikan Kabupaten Bandung dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023 sebagai berikut:



Gambar 9. Pertumbuhan Rapor Pendidikan di Kabupaten Bandung

Hasil Rapor pendidikan tersebut harus digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang berbasis data. Rapor pendidikan bisa merupakan data relevan dan terukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi, dan mengukur pencapaian tujuan.

Berikut capaian adoption rate rapor pendidikan kaitan dengan perencanaan berbasis data Kabup[at]aten Bandung jenjang PAUD, SD, dan SMP yang diunduh tanggal 15 Oktober 2023 sebagai berikut:



Gambar 10. Perencanaan Berbasis Data

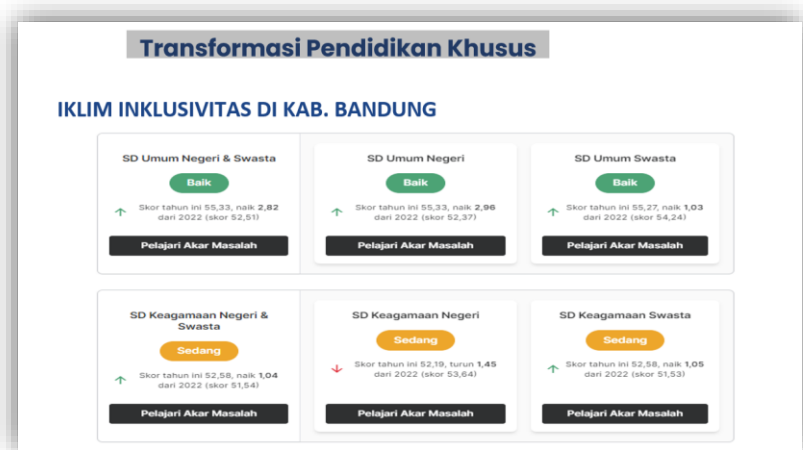


Dari data tersebut diketahui bahwa:

1. Satuan Pendidikan yang sudah login rapor baru sekitar 59.1%, sementara masih ada yang belum log in rapor sekitar 40.9%
2. Satuan Pendidikan yang sudah Eksplorasi Rapor baru sekitar 3.6%, sementara masih ada yang belum log in rapor sekitar 45.6%, dan sebanyak 50.8% nya memang tidak tersedia yakni di jenjang PAUD.
3. Satuan Pendidikan yang sudah unduh berkas baru sekitar 56.4%, sementara masih ada yang belum log in rapor sekitar 43.6%

Transformasi pendidikan Khusus Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Dashboard Rapor Pendidikan kabupaten Bandung yang diunduh tanggal 10 September 2023, berikut data transformasi pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung:



Gambar 11. Transformasi Pendidikan Khusus Bagian 1



Gambar 12. Transformasi Pendidikan Khusus Bagian 2

1. Iklim Inklusivitas pada satuan SD Umum Negeri dan Swasta tahun 2023 adalah 55.33. Ini menunjukkan ada kenaikan 2.62% dari tahun 2022 yang hanya 52.51%
2. Iklim Inklusivitas pada satuan SD Keagamaan Negeri dan swasta tahun 2023 adalah 52.58. Ini menunjukkan ada kenaikan 1.04% dari tahun 2022 yang hanya 51.54%

3. Iklim Inklusivitas pada satuan SDLB Negeri dan Swasta tahun 2023 adalah 59.91. Ini menunjukkan ada penurunan 0.3% dari tahun 2022 yang hanya 60.21%
4. Iklim Inklusivitas pada satuan SD Kesetaraan Negeri dan Swasta tahun 2023 adalah 54.61. Ini menunjukkan ada penurunan 0.08% dari tahun 2022 yang hanya 54.69%

Dan berikut data komitmen pemerintah daerah Kab Bandung dalam implementasi pendidikan inklusif:

Transformasi Pendidikan Khusus		
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF		
No	Pelaksanaan Komitmen Pemda	Keterangan
1.	Regulasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Sudah (Sekolah Ramah Anak tahun 2021)
2.	Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Sudah
3.	Membentuk Tim/ Pokja implementasi kebijakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Sudah
4.	Alokasi Anggaran untuk Mendukung PTK di Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Sudah (ada dalam anggaran Sekolah Ramah Anak)
5.	Peningkatan Kompetensi PTK di Satuan Pendidikan terkait Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Belum
6.	Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Belum
7.	Pendampingan Implementasi Kebijakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Nilai Iklim Inklusivitas di Rapor Pendidikan	Belum
8.	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Nilai Iklim Inklusivitas di Rapor Pendidikan	Belum
9.	Data Mitra Pembangunan dalam Implementasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Sudah

Gambar 13. Transformasi Pendidikan Khusus

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil studi ini menunjukkan bahwa Merdeka Belajar di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Persepsi positif terhadap AN dan Sulingjar di Kabupaten Bandung baru mencapai 30%, hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan pemahaman *stakeholder*, peningkatan kesadaran untuk mendukung kesetaraan pendidikan, serta perlu menekankan perlunya strategi khusus untuk meningkatkan dukungan di tingkat PAUD yang baru mencapai 30%.
2. Kabupaten Bandung memiliki 518 Guru Penggerak, yang 69 orangnya sudah diangkat menjadi Kepala Sekolah, dan 291 memenuhi syarat menjadi KS yang merupakan potensi untuk meningkatkan jumlah Kepala Sekolah dari Guru Penggerak. Implementasi perlu dipantau melalui sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
3. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Kabupaten Bandung sebanyak 17 sekolah pelaksana PSP, belum terlihat pengimbasan atau berbagi praktik baik oleh guru. Namun baru ada langkah positif dalam peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas, peningkatan skor Rapor Pendidikan masih terbatas pada kisaran 40%.
4. Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan, sebab baru mencapai 54.3% yang cukup baik, dan baru 1.7% yang sudah baik. Pemanfaatan PMM perlu ditingkatkan, terutama pada tahap Proses Belajar, Aksi Nyata, Penggunaan Asesmen, dan Penggunaan Perangkat Ajar.
5. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Belajar.id di Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan. Hanya 57.18% Guru memiliki akun belajar.id, dengan fokus pada aktivasi dan partisipasi lebih lanjut. Sementara itu, dari 3.499 sekolah, baru 74.62%



yang berpartisipasi aktif dalam Rapor Pendidikan, menunjukkan masih perlu peningkatan kesadaran dan pelatihan.

6. Iklim inklusivitas di Kabupaten Bandung masih sangat perlu ditingkatkan, pada tahun 2023 ini, hasil yang diperoleh SD Umum baru mencapai 55.33%, dan SD Keagamaan baru mencapai 52.58%, SDLB 59.91%, sedangkan SD Kesetaraan baru mencapai 54.61%.

Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diusulkan adalah:

1. Perlu dirancang kebijakan dan regulasi seperti peraturan bupati yang mendukung Merdeka Belajar, termasuk aturan yang memfasilitasi Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemanfaatan Rapor Pendidikan serta Program Pendidikan Khusus Inklusi.
2. Dilakukan sosialisasi secara luas untuk memahamkan masyarakat, guru, dan pihak terkait tentang konsep dan manfaat Merdeka Belajar, perubahan kebijakan dan langkah-langkah implementasi kepada semua pemangku kepentingan.
3. Membentuk tim implementasi Merdeka Belajar yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, ahli pendidikan, dan *stakeholder* terkait dengan menetapkan peran dan tanggung jawab tim.
4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program Merdeka Belajar, termasuk Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemanfaatan Rapor Pendidikan serta Program Pendidikan Khusus Inklusi
5. Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi guru, kepala sekolah dan penilik/pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan Merdeka Belajar, serta memberikan dukungan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era Merdeka Belajar.
6. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendukung program Merdeka Belajar, serta melibatkan stakeholders eksternal sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar.
7. Dengan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, sosialisasi, tim implementasi, alokasi anggaran, peningkatan kompetensi, fasilitasi sarana prasarana, pendampingan, pemantauan, dan kemitraan, implementasi Merdeka Belajar di tingkat lokal dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan dampak positif pada dunia pendidikan.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan: Tinjauan dari Aspek Kurikulum dan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 21(1), 45-58.
- Daryanto. (2017). Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar: Konsep dan Implementasinya. Gava Media.
- Kemendikbud. (2020). Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Priyono, A. (2019). Analisis Dampak Program Merdeka Belajar terhadap Peningkatan Kualitas Guru. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 89-104.



- Setiawan, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(1), 78-92.
- Sudjana, N. (2016). Pembaruan Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 34-47.
- Suparman, A. (2018). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 123-136.
- Suryadi, D. (2018). Model Pembelajaran Inovatif dalam Implementasi Program Merdeka Belajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 4(2), 160-175.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional URL: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_20.pdf
- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. URL: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2005_14.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44996>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114184>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139907>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157487>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kusumaningtyas, E., & Haryono, F. (2017). Peran Orang Tua dalam Mendorong Keberhasilan Program Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 9(1), 89-104.
- Mahardika, I., & Wulandari, J. (2020). Dukungan Masyarakat terhadap Keberhasilan Program Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 14(1), 56-69.
- Riyanto, C., & Nurhadi, D. (2021). Analisis Dampak Program Merdeka Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 15(3), 160-175.
- Setiawan, B., & Indriani, Y. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Merdeka Belajar terhadap Peningkatan Kualitas Guru di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Menengah*, 7(2), 78-92.



- Susanto, A., & Wibowo, A. (2020). Implementasi Program Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 45-58.
- Sutisna, D., & Prasetyo, E. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2), 34-47.
- Widiastuti, F., & Santoso, G. (2019). Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar dalam Peningkatan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 5(2), 123-136.